

## PENGARUH JUMLAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN PEMBIAYAAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

<sup>1)</sup>Yusnarto Fizai Atmojo Pasaribu, <sup>1)</sup>Oktama Gusti Yudha Aryanto, <sup>1\*)</sup>Birgitta Dian Saraswati

<sup>1)</sup>Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

e-mail : \*[birgitta.saraswati@uksw.edu](mailto:birgitta.saraswati@uksw.edu)

### ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan sektor yang krusial dalam perekonomian Indonesia, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 2022 sebesar 12,40%. Salah satu masalah yang dihadapi para petani adalah dalam hal permodalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah LKM dan jumlah pembiayaan yang diberikan LKM terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel tahun 2019-2022 di 21 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan mikro tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan output sektor pertanian, hal ini terjadi karena keberadaan lembaga keuangan mikro yang tidak merata di Indonesia. Kemudian pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan output di sektor pertanian, hal tersebut diduga karena moral hazard petani dan lemahnya regulasi yang menjadi dasar hukum LKM.

**Kata kunci:** LKM; Sektor Pertanian; PDRB

### ABSTRACT

The agricultural sector is a crucial sector in the Indonesian economy, this can be seen from its contribution to Gross Regional Domestic Product in 2022 of 12.40%. One of the problems faced by farmers is in terms of capital. The aim of this research is to analyze the influence of the number of MFIs and the financing provided by MFIs in Indonesia. This research uses quantitative methods with panel data regression analysis techniques for 2019-2022 in 21 provinces in Indonesia. The results of this research show that the number of microfinance institutions has no effect on the growth of the agricultural sector, this occurs because the existence of microfinance institutions is not evenly distributed in Indonesia. Then the financing provided by microfinance institutions has a negative effect on the growth of the agricultural sector, this is thought to be due to farmers' moral hazard and weak regulations that form the legal basis for MFIs.

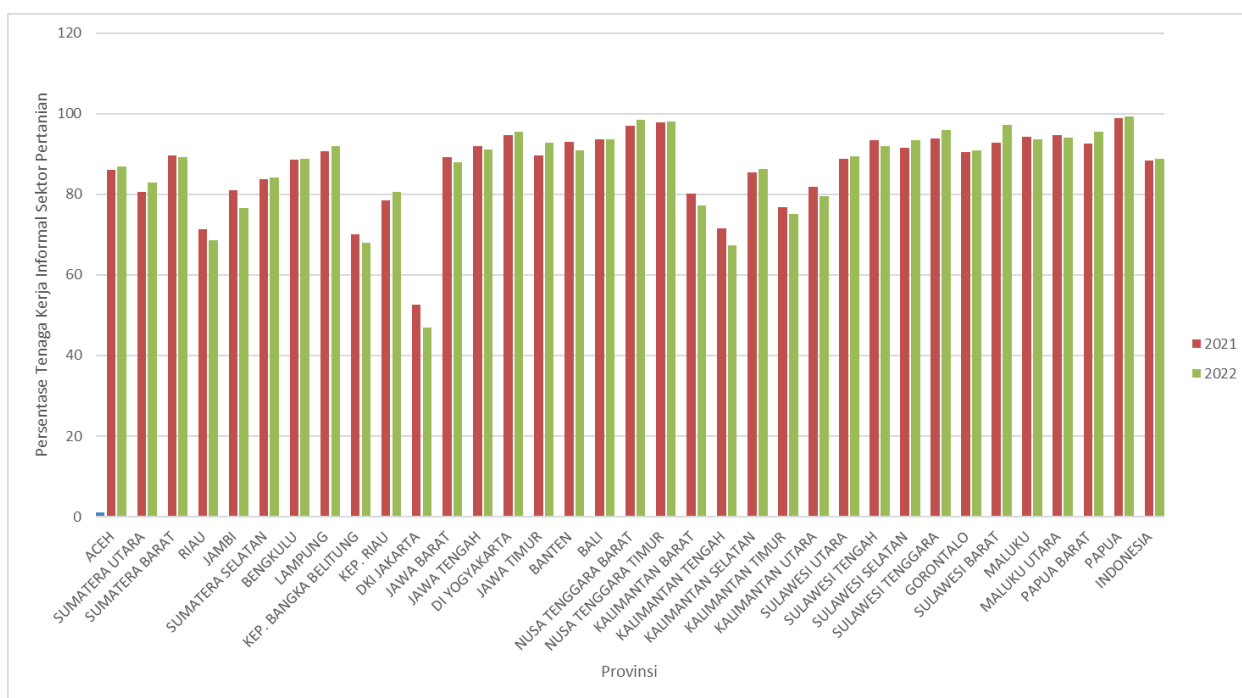
**Keywords:** MFIs; Agricultural Sector; Gross Regional Domestic Product

## I. PENDAHULUAN

Indonesia telah lama dikenal sebagai negara agraris berada di garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan dua musim. Sehingga berbagai jenis tanaman dapat dibudidayakan di Indonesia. Ini ditunjukkan dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Selain itu, sumber daya pertanian di Indonesia juga sangat beragam dan di setiap provinsi mempunyai ciri khas tersendiri untuk menghasilkan produk pertanian dengan hasil yang berbeda - beda. Hal ini menyebabkan pemerintah di tiap provinsi diharuskan untuk memberikan perhatian bagi

sektor yang memiliki potensi tinggi. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya di suatu provinsi harus diintensifkan dengan memperhatikan peta prioritas pembangunan.

Tenaga kerja muda di Indonesia banyak terserap di sektor pertanian (32% dari seluruh angkatan kerja muda yang bekerja, 53% dari seluruh angkatan kerja muda pedesaan yang bekerja) (Nugraha & Herawati, 2015). Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar oleh sektor ini menunjukkan betapa krusialnya pertanian bagi perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya penyerapan tenaga kerja informal dari sektor pertanian tahun 2021 sampai 2022 (Gambar 1).



Gambar 1. Grafik Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian 2021-2022  
 Sumber : BPS 2023, data diolah

Berdasarkan Gambar 1 Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian 2021 - 2022 di atas, mayoritas tenaga kerja informal di Indonesia berprofesi sebagai petani. Selama tahun 2021 sampai 2022 hanya satu provinsi yang besar persentasenya di bawah 60%. Bahkan beberapa provinsi seperti NTB, NTT, dan Papua menunjukkan hampir 100% dari tenaga kerja informal di provinsi - provinsi tersebut adalah seorang petani. Perubahan persentase yang terjadi di tiap provinsi dari tahun 2021 - 2022 juga cenderung rendah dan tidak signifikan. Hanya beberapa provinsi yang mengalami penurunan persentase yang signifikan seperti Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

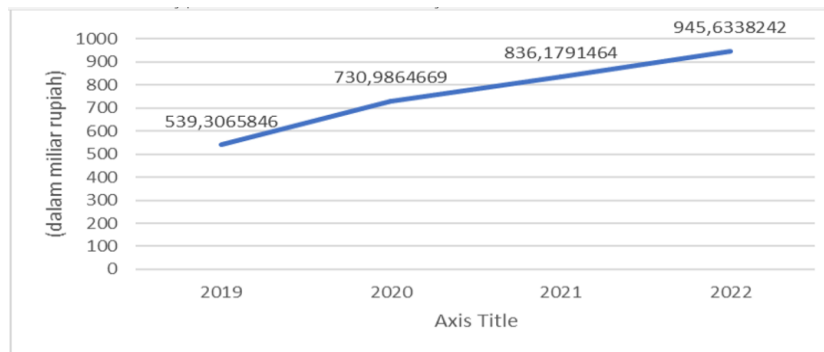
Selain dalam penyerapan tenaga kerja, pertanian juga merupakan sektor yang memiliki peranan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian disebut sebagai sektor yang paling

dominan dengan angka pertumbuhannya sebesar 0,34% serta memiliki kontribusi yang mencapai 11,77%. Hal tersebut menguatkan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia ditambah dengan kontribusi yang diberikan sektor pertanian ke pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya terdapat pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyedia bahan baku industri. Sektor pertanian ini juga berperan dalam pemerataan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan masyarakat serta menyeimbangkan ekosistem.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam pertanian adalah masalah permodalan. Peningkatan kebutuhan modal berjalan seiring dengan semakin beragam pilihan jenis komoditas dan pola tanam, perkembangan teknologi budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil yang semakin pesat. Pada era teknologi pertanian semakin bagus, pengerahan modal yang intensif baik untuk alat - alat pertanian maupun sarana produksi tidak dapat dihindari. Di dalam praktek usaha tani diperlukan inovasi teknologi guna mendorong peningkatan produktivitas dan produksinya (Hendayana & Bustaman, 2007).

Keterbatasan akses layanan usaha dalam permodalan menjadikan kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas, sehingga menyebabkan produktivitas yang dicapai berada di bawah produktivitas potensial. Keterbatasan modal selalu menjadi kendala bagi petani, karena sebagian besar petani tidak memiliki sertifikasi atau asuransi sehingga sulit untuk mengajukan pembiayaan bank. Aspek modal menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi pelaku usaha pertanian. Telah banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan telah banyak sistem yang dikembangkan untuk penguatan modal masyarakat. Mulai dari KUT (Kredit Usaha Tani), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM), dan lain sebagainya (Zakariya, 2019). Namun belum banyak yang berhasil memicu pertumbuhan ekonomi yang akhirnya bermuara pada berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di pedesaan.

LKM di Indonesia tumbuh dengan cepat yang terlihat dari jumlah LKM yang ada di seluruh Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah LKM di Inonesia adalah sebanyak 228 meningkat dibandingkan jumlah LKM di tahun 2019 yang hanya sebanyak 204 (Prasetya et al., 2022). Selain jumlah LKM yang terus meningkat, pembiayaan yang diberikan LKM juga terus meningkat tiap tahun.



Gambar 2. Grafik Pembiayaan yang diberikan LKM di Indonesia tahun 2019-2022  
Sumber : OJK 2023, data diolah

Dari Gambar 2 di terlihat bahwa pembiayaan yang diberikan LKM terus meningkat, seperti yang ditunjukkan pada tahun 2019-2022. Jumlah LKM dan pembiayaan yang diberikan LKM terus menunjukkan peningkatan di Indonesia. Keberadaan LKM ini diharapkan mampu menjadi sumber permodalan bagi sektor pertanian.

Penelitian Wahyuni, (2019) menunjukkan bahwa LKM Agribisnis berpengaruh secara signifikan dan berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan anggota Gapoktan di Desa Barebbo. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Sa'diyah & Dyanasari, (2014) yang menyatakan bahwa LKM mempunyai peran yang signifikan terhadap usaha tani Kubis di Kecamatan Sukapura. Sementara itu penelitian Wakarmamu, (2014) menyatakan bahwa keberhasilan LKM masih bias pada usaha non-tani, sedangkan usaha tani belum mendapat prioritas yang ditandai alokasi dana untuk usaha tani hanya sebesar 10% dari keseluruhan dana.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah LKM dan jumlah pembiayaan yang diberikan LKM terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pembiayaan LKM, jumlah LKM, dan sumbangan sektor pertanian pada PDRB di Indonesia tahun 2019 - 2022. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait LKM yang akan berdampak pada perkembangan sektor pertanian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 PDRB

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi atau dihasilkan oleh suatu wilayah/regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa suatu daerah mengalami kemajuan dalam perekonomiannya (Dama et al., 2016). Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga pasar merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*)

yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (BPS, 2023). Nilai tambah merupakan suatu nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Perhitungan nilai tambah meliputi nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto meliputi komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh nilai PDRB nominal.

## 2.2 Lembaga Keuangan Mikro

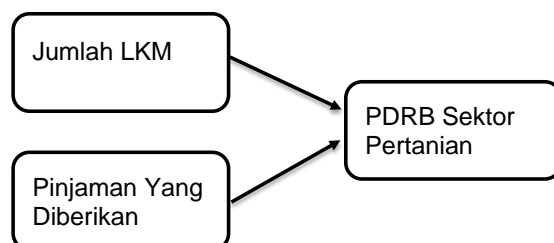
LKM adalah lembaga yang bergerak pada keuangan pembiayaan yang didirikan khusus untuk memberikan pengembangan usaha serta jasa pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan maupun peminjaman pada usaha pada skala mikro untuk anggota bahkan masyarakat, pemberian jasa konsultasi mengelola simpanan maupun pengembangan usaha yang tidak serta merta mendapatkan profit (OJK, 2023). Lembaga Keuangan Mikro merupakan terjemahan dari *microfinance* didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi komunitas masyarakat kecil (tradisional) dan berfungsi sebagai pembangunan pengentasan kemiskinan. *Microfinance* merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang memberikan kredit mikro terhadap masyarakat kurang mampu untuk membiayai usaha-usaha keluarga yang dikerjakan sendiri atau sekelompok masyarakat (Mujiono, 2017).

## 2.3 Pengaruh LKM terhadap PDRB sektor pertanian

Penelitian yang dilakukan Yunan et al., (2020) menyatakan bahwa sinergi antara Lembaga Keuangan Syariah Mikro Berbasis Agribisnis, Dana Perwalian Pertanian, dan Pemerintah dapat menggerakkan perekonomian dan turut berkontribusi dalam inklusi keuangan untuk perekonomian pedesaan yang berkelanjutan dengan memberikan pembiayaan usaha, kemitraan, dan pembangunan serta perlindungan jika terjadi gagal panen, meningkatkan taraf hidup petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Hasil penelitian lain yang dilakukan Zakariya, (2019) menunjukkan hasil bahwa LKM Agribisnis berperan positif dalam meningkatkan kemajuan anggota Kelompok Tani Sekar Putih, Nganjuk. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yunan et al., (2020) yang menunjukkan LKM Agribisnis berkontribusi terhadap inklusi keuangan untuk perekonomian pedesaan yang berkelanjutan dengan memberikan pembiayaan usaha, kemitraan, dan pembangunan serta perlindungan kegagalan panen dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani. Penelitian lain yang dilakukan Hendayana & Bustaman, (2007) menyatakan LKM berpeluang untuk dijadikan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian sehingga tercapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

H1 : Jumlah LKM berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian

H2 : Pembiayaan yang diberikan LKM berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertanian



Gambar 3. Model Penelitian

### III. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab persoalan penelitian yaitu identifikasi bagaimana pengaruh jumlah LKM dan pembiayaan yang diberikan LKM terhadap PDRB sektor pertanian, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data panel 21 provinsi pada periode 2019-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah LKM, pembiayaan yang diberikan LKM, dan persentase PDRB sektor pertanian yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

#### 3.1 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Regresi data panel adalah teknik regresi yang merupakan penggabungan antara data cross-section dan data time-series. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu PDRB sektor pertanian, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu jumlah LKM dan pembiayaan yang diberikan LKM. Adapun model penelitian regresi data panel ditunjukkan sebagai berikut :

$$PP_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

$\beta_0$  : Konstanta

Y : PDRB Pertanian

$X_1$  : Jumlah Lembaga Keuangan Mikro

$X_2$  : Pembiayaan yang Diberikan Lembaga Keuangan Mikro

$\beta_1, \beta_2$  : Koefisien regresi variabel independen

i dan t : Konponen *cross section* (provinsi i) dan *time series* (tahun t)

$e_{it}$  : Standar Error

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi parameter model regresi data panel, yaitu pendekatan *Common effects*, *Fixed effects* dan *Random effects*.

### 1. *Common Effect Model*

Pada metode ini menggunakan asumsi bahwa nilai *intercept* masing-masing variabel adalah sama, begitu pula slope koefisien untuk semua unit *cross section* dan *time series* adalah sama.

### 2. *Fixed Effect*

*Fixed effect model* adalah metode regresi yang mengestimasi data panel dengan menambahkan variabel boneka (*dummy variable*). Pada model FEM ini mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepnya. Oleh karena itu, dalam *fixed effect model* setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel boneka sehingga metode ini seringkali disebut dengan *Least Square Dummy Variable*.

### 3. *Random Effect Model*

*Random effect model* akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu atau antar individu. Pada *fixed effect model* memungkinkan munculnya masalah berkurangnya nilai derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang mengakibatkan berkurangnya efisiensi parameter.

Sebelum melakukan estimasi model data panel, perlu dilakukan pengujian kelayakan model seperti *Chow Test*, *Hausman Test*, berikut :

#### a) Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara pendekatan *Common Effect* atau pendekatan efek tetap (*Fixed Effect*) yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Hasil uji Chow ditunjukkan oleh Tabel 1 di bawah ini:

Effects Test	Statistic	Prob
Cross-section F	427.870.523	0.0000
Cross-section Chi-square	395.994.060	0.0000

Table 1. Uji Chow

Sumber : olahan penulis, 2023

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai *probability cross-section chi-square* sebesar 0,0000. Nilai tersebut bernilai dibawah 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji chow, maka

model yang dipilih adalah pendekatan efek tetap atau *fixed effect*. Setelah melakukan uji chow, dilakukan uji hausman untuk menentukan model atau teknik analisa data panel antara pendekatan *common effect* dan pendekatan efek tetap atau *fixed effect*.

#### b) Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk memilih model yang terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model*.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Prob.
Cross-section random	4.349.357	0.1136

Table 2. Uji Hausman  
Sumber : olahan penulis, 2023

Tabel 2 menunjukkan hasil uji hausman dimana dapat dilihat bahwa nilai signifikansi probabilitas *cross section random* lebih besar dari nilai signifikansi ( $0.1136 > 0.05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ditolak dan diterima, dan demikian model yang dipilih adalah *random effect model*.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Analisis Data

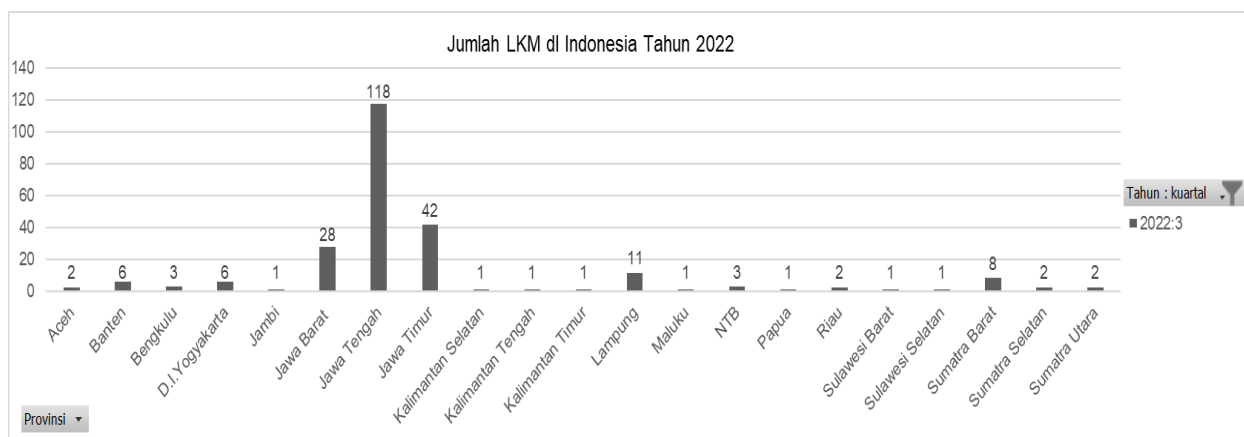
Hasil uji *Chow* dan uji *Hausman* menemukan hasil terbaiknya yaitu *fixed effect model* dan *Random Effect* estimasi dalam penelitian ini harus menguji lagi dengan metode uji LM.

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	1.985.840	1.619.951	0,0000
X1	0,083124	1.597.331	0,79375
X2	-0,063694	-3.813.435	0,0003

Table 3. Uji LM  
Sumber : olahan penulis, 2023

Tabel hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel  $X_1$  yaitu jumlah LKM tidak berpengaruh terhadap variabel Y yaitu pertumbuhan output di sektor pertanian, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas t stat 0,79375 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indarti et al., (2022) yang juga menunjukkan bahwa variabel jumlah LKM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.





Gambar 4. Grafik Jumlah LKM di Indonesia Tahun 2022  
 Sumber : OJK 2023, data diolah

Dari Gambar 4 terlihat bahwa perkembangan jumlah LKM di Indonesia terpusat di Indonesia bagian Barat terutama di Pulau Jawa. Pulau Jawa terdapat LKM sebanyak 200, seperti yang kita lihat bahwa Jawa Tengah menempati jumlah LKM tertinggi sebesar 118. Sedangkan jumlah LKM yang ada di Indonesia bagian Timur sebanyak 7 lembaga dan Indonesia bagian tengah sebanyak 5 lembaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah LKM masih sangat sedikit dan jumlah LKM masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

## 4.2 Pembahasan

Variabel  $X_2$  yaitu pembiayaan yang diberikan LKM menunjukkan adanya hubungan negatif antara  $X_2$  dengan variabel Y yang ditunjukkan oleh koefisien variabel  $X_2$  bernilai negatif yaitu -0,063694. Artinya ketika pembiayaan yang diberikan LKM meningkat justru akan menurunkan PDRB sektor pertanian. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wakarmamu, (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan LKM belum terfokus pada pertanian yang hanya 10% dari keseluruhan. Penelitian ini menemukan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Zakariya, (2019) yang menunjukkan hasil bahwa LKM Agribisnis berperan dalam meningkatkan kemajuan anggota kelompok tani sekar putih, nganjuk. Perbedaan juga ditemukan dari hasil penelitian Sa'diyah & Dyanasari, (2014) yang menyatakan bahwa LKM mempunyai peran yang signifikan terhadap usahatani kubis di Kecamatan Sukapura. Perbedaan tersebut terjadi diduga karena penelitian yang dilakukan Zakariya, (2019) dan Sa'diyah & Dyanasari, (2014) dilakukan di Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi kedua dengan jumlah LKM terbanyak. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Jawa Timur sudah memanfaatkan keberadaan LKM untuk permodalan. Sementara daerah – daerah lain dengan jumlah LKM yang sedikit mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat akan LKM masih minim. Selain itu dugaan lain seperti terjadinya *moral hazard* dari petani sehingga pembiayaan yang diberikan LKM tidak dimanfaatkan sebagai modal melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadi. Selain itu penelitian

Hanggana, (2018) menyebutkan keberadaan LKM belum memberikan dukungan yang optimal bagi petani yang disebabkan oleh lemahnya regulasi yang menjadi dasar operasional LKM

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan dapat ditarik disimpulkan bahwa jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak berpengaruh terhadap PDRB sektor pertanian, hal ini diduga terjadi karena penyebaran LKM yang kurang merata. Selain itu, pembiayaan yang diberikan LKM menunjukkan pengaruh negatif terhadap PDRB sektor pertanian, hal ini diduga karena pembiayaan LKM yang tidak begitu terfokus pada pertanian, *moral hazard* dari petani, dan lemahnya regulasi yang menjadi dasar hukum operasional kelembagaan-kelembagaan petani tersebut

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas maka kedepannya pemerintah disarankan untuk membuat kebijakan yang meratakan penyebaran LKM di Indonesia. Selain itu pemerintah memberi sosialisasi pada para petani mengenai LKM yang dapat membantu sumber permodalan agar sektor pertanian di Indonesia dapat semakin berkembang kedepannya. Pihak LKM juga perlu memberi bimbingan bagi para petani agar tidak terjadi *moral hazard*.

## REFERENSI

- BPS. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)*. Bps.Go.Id. <https://www.archive.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab1>
- Dama, H. Y., Lopian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549–561.
- Hanggana, S. (2018). Regulations Weakness Analysis of Farmers Group, Gapoktan, UPJA, and LKM-A in Order to Enhance Farmers' Income. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 15(2), 137–149.
- Hendayana, R., & Bustaman, S. (2007). Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 29–38.
- Indarti, D., Maulidiya, E., Simorangkir, C., & Saraswati, B. D. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Analisis*, 12(2), 176–192. <https://doi.org/10.37478/als.v12i2.1757>
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207–215.
- Nugraha, Y. A., & Herawati, R. (2015). Menguak Realitas Orang Muda Sektor Pertanian Di Perdesaan. *Seri Penelitian Akatiga*, 19(1), 1–23.
- OJK. (2023). *Lembaga Keuangan Mikro*. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-keuangan-micro.aspx>

- Prasetya, M. A. W., Lutfitasari, P., Sairo, J., & Saraswati, B. D. (2022). Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Analisis*, 12(1), 60–74. <https://doi.org/10.37478/als.v12i1.1137>
- Sa'diyah, A. A., & Dyanasari, D. (2014). Peran Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Penguatan Usahatani Kubis Di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.29244/jai.2014.2.1.1-10>
- Wahyuni. (2019). Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota Gabungan Kelompok Tani (Studi Pada desa Barebbo Kecamatan Barebbo). *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, 2, 91–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/al-tsarwah.v2i1.283>
- Wakarmamu, T. (2014). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(3), 11–18. <https://doi.org/10.56076/jkesp.v1i3.2048>
- Yunan, Z. Y., Permana, H., Aprilia, D., & Abdullah, F. (2020). Peranan Pemerintah dan Optimalisasi Sektor Pertanian dengan Sinergitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Agribisnis dan Agriculture Trust Fund. *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1), 24–38. <https://doi.org/10.47903/ji.v10i1.127>
- Zakariya, M. (2019). Peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Amanah Mandiri Syari'ah Terhadap Kelompok Tani di Desa Sekarputih Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(2), 183–199. <https://doi.org/10.53429/jdes.v6i2.17>